
PEMBENTUKAN KELAS MENENGAH KOTA: PERAN DAN IMPLIKASI KEBERADAANNYA TERHADAP PERCEPATAN PEMBANGUNAN

*Aldwin Surya**)

Abstract: In the globalization era role and existence of urban middle class become more important. In many cases, the urban middle class becomes balancer between upper and lower class. Serious attention upon profession and professionalism shown by urban middle class directly motivate others to work hard, to be discipline, and to appreciate the ethics and to honor individual human rights.

Keyword:

Pendahuluan

Sebagai bagian dari masyarakat, kelas menengah kota memiliki arti penting bagi bangsa dan negeri karena mereka umumnya adalah kelompok orang yang memiliki pendidikan tinggi, bekerja mengikut profesi dan kode etik masing-masing, mempunyai pendapatan memadai, dan memiliki prestij tinggi di dalam masyarakat. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari kelas menengah adalah kelompok orang yang meraih sukses karena memiliki disiplin tinggi, mandiri (*independent*), mematuhi ketentuan-ketentuan berlaku, dan memberi sumbangan berarti melalui karya mereka dibidang masing-masing. Dengan keahliannya, kelas menengah kota dibanyak negeri di dunia, memainkan peranan berarti baik disektor swasta maupun disektor pemerintahan sehingga menimbulkan citra baik

(*goodwill*) untuk negerinya. Di Philipina misalnya, kelas menengah memberi banyak sumbangan pemikiran terhadap pembangunan negeri. Bahkan gerakan *people power* untuk percepatan demokrasi, justru dimotori oleh kalangan kelas menengah yang umumnya bermukim di kota. Dibeberapa negeri maju, peran kelas menengah semakin diperlukan untuk memicu percepatan pembangunan disegala bidang. Apalagi, dibebeberapa negeri jumlah kelas menengah relatif lebih besar dibanding dengan kelas atas dan kelas bawah. Itu sebabnya, terbentuknya kelas menengah sebagai bagian dari pelapisan sosial masyarakat sangat berarti bagi sebuah negeri karena kelas menengah berperan sebagai penyeimbang kekuatan dan kesenjangan kelas atas dan kelas bawah.

Muara terbentuknya kelas menengah dapat terjadi karena adanya pelapisan sosial di dalam struktur masyarakat. Pelapisan sosial timbul karena adanya ketaksamaan sosial

*) Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Dharmawangsa

(*inequality*), misalnya ketaksamaan dari sisi kemakmuran, pekerjaan, kekuasaan dan gengsi/prestij. Semakin besar jarak ketaksamaan itu, semakin jauh kesenjangan yang terjadi antara kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Ketaksamaan seperti ini juga berlaku di Indonesia. Sebagai negeri berkembang, keberadaan kelas sosial di Indonesia yang terdiri dari kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah dengan mudah dapat dicermati dari pendapatan dan pola konsumsinya. Masyarakat dengan pendapatan tinggi, sangat mungkin diperoleh oleh orang-orang yang memiliki keterampilan dan pendidikan tinggi. Sebagian dari mereka itu adalah para lulusan perguruan tinggi. Banyak pekerjaan yang menggunakan teknologi tinggi, mensyaratkan agar calon pekerja adalah para profesional yang berarti adalah mereka yang memiliki pendidikan dan keahlian tinggi.

Di Indonesia pelapisan sosial masyarakat di beberapa kawasan Indonesia, telah berlangsung sejak lama. Pada masa sebagian wilayah Indonesia diperintah oleh sistem kerajaan, pelapisan sosial yang membedakan orang dalam kelompok kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah, terdiri dari 1) lapisan bangsawan, 2) lapisan priyayi, ulama, dan 3) lapisan 'wong' cilik atau rakyat jelata. Di kawasan lain terdiri dari 1) raja dan keluarganya, 2) pegawai raja, 3) golongan ulama, dan 4) golongan rakyat jelata. Dalam masa penjajahan Belanda, pelapisan sosial di Indonesia terdiri dari 1) golongan Eropah yang dipersamakan, 2) golongan Timur Asing, dan 3) golongan Bumiputra. Pada masa penjajahan Jepang, pelapisan sosial di Indonesia terdiri dari 1) orang-orang Jepang, 2)

orang-orang pribumi, dan 3) orang-orang Eropah dan Timur Asing lainnya.

Namun sistem kerajaan itu sudah tidak ditemui lagi di era globalisasi saat ini. Di dalam masyarakat modern saat ini, pelapisan sosial cenderung dilihat dari sisi ekonomi yaitu 1) golongan atas, 2) golongan menengah, dan 3) golongan bawah. Manakala pelapisan sosial berdasarkan kriteria profesi terdiri dari : 1) kelompok profesional, 2) kelompok semi profesional, dan 3) kelompok teknisi (pekerja kasar).

Sorotan Kajian Terdahulu

Kajian tentang kelas menengah di Indonesia telah lama menarik perhatian para pakar. Berbagai tulisan mereka tentang kelas menengah, diamati dari berbagai sisi. Sebagian dari tulisan para pakar itu, kemudian dijadikan sebuah buku yang berjudul, "*Kelas Menengah Bukan Ratu Adil*" (1999). Di dalam buku itu dimuat berbagai kajian teoretikal dan empirikal.

Beberapa tulisan yang mengungkap tentang teori kelas menengah antara lain berasal dari tulisan Ariel Heryanto (1993) tentang "*Kelas Menengah Yang Majemuk*". Dalam tulisannya, Heryanto cenderung mempertahankan teori dikotomi dua kelas yang terbentuk oleh kesenjangan penguasaan atas alat-alat produksi. Artinya, hanya ada dua kelas dalam satu tata produksi: kelas yang dikuasai dan kelas yang menguasai. Tetapi dalam kebanyakan masyarakat mutakhir, dapat dikenali beberapa kelas atasan dan beberapa kelas bawah, masing-masing berasal dari tata produksi yang berbeda.

Tulisan Benny Subianto (lihat *Kompas*, 19/10/1998) tentang "*Kelas*

Menengah di Indonesia” dan tentang “*Konsep yang kabur*”, mengungkap bahwa keberadaan kelas menengah adalah lemah karena proses sejarah yang membentuknya. Dalam tulisan Silvia Werner (lihat *The Jakarta Post*, 23 Juni 1997), “*Mendefinisikan Kelas Menengah Baru*”, beliau telah mengungkapkan bahwa pembangunan menuju modernisasi sangat berperan dalam menjembatani kesenjangan antara yang kaya dan miskin, serta menegakkan penguasaan (kontrol) dan keseimbangan terhadap kaum elite politik dan ekonomi yang kuat.

Beberapa tulisan yang bersumber dari majalah *Gatra* (1995, 1996, dan 1997) serta *Forum Keadilan* (1995 dan 1996), mengungkap posisi kelas menengah dan demokrasi antara lain berasal dari kelompok tulisan Yuwono Sudarsono, “*Kelas Menengah dan Demokrasi Lapisan Menengah*” (lihat *Gatra*, 4 Januari 1997), R. William Liddle, “*Kelas dan Demokratisasi*”, (lihat *Gatra*, 4 Januari 1997), Harold Crouch, “*Kelas Menengah dan Demokratisasi*” (lihat *Gatra*, 31 Mei 1997), Francois Raillon, “*Kelas Menengah dan Demokratisasi dari Bawah*” (lihat *Forum Keadilan*, Agustus 1995), Arif Budiman, “*Demokratisasi dan Keadaan Kelas Menengah Indonesia*” (lihat *Forum Keadilan*, April 1996), Rizal Mallarangeng, “*Kelas Menengah dan Demokratisasi*” (lihat *Gatra*, 4 Januari 1997), dan Ariel Heryanto, “*Oposisi Kelas Menengah Indonesia Dekade 1990-an*” dalam Gary Rodan (ed. 1996) yang bertajuk “*Indonesian Middle Class Oppositions in the 1990s*”.

Dalam tulisan Yuwono Sudarsono (1997) tentang “*Kelas Menengah dan Demokrasi Lapisan Menengah*”, beliau menyebutkan bahwa kelas menengah sebagai penggerak demokratisasi hanya berlaku sampai akhir Abad ke 19. Kemajuan teknologi, perluasan perdagangan, berkembangnya industri pengangkutan dan jasa informasi telah lama meruntuhkan sendi-sendi teori perlunya kelas menengah. Kekuasaan baik yang bersumber dari harta, kepintaran otak maupun pemilikan atas tanah, bukannya semakin lebar, tetapi hanya dimiliki sekelompok orang saja.

Dalam tulisan Liddle (1997) tentang “*Kelas dan Demokratisasi*”, beliau menyebutkan bahwa telah terjadi perkembangan pesat dari kelas menengah di Indonesia, yang disebabkan oleh dasar makro ekonomi para teknokrat. Namun, menurut beliau, perkembangan pesat dari kelas menengah itu tidak diikuti oleh munculnya kepentingan, kemampuan dan kesadaran yang cukup dari kelompok kelas menengah itu terhadap praktik demokratisasi. Berbeda dengan kesadaran kelas menengah di Indonesia terhadap demokratisasi yang masih belum optimal. Dalam tulisan Harold Crouch (1997) tentang “*Kelas Menengah dan Demokratisasi*”, disebutkan bahwa kelas pengusaha telah memberikan bantuan sangat penting pada gerakan demokrasi untuk menumbangkan posisi Marcos sebagai Presiden di Filipina (1986), dan Jenderal Suchinda sebagai Perdana Menteri di Thailand (1992). Manakala sebaliknya, kelas pengusaha di Singapura dan Malaysia tidak menonjol dalam gerakan demokrasi. Beberapa penyebabnya adalah karena

ekonomi Singapura dikuasai oleh perusahaan asing, sehingga peranan pengusaha setempat lebih terbatas. Manakala di Malaysia, sebagian besar pengusaha terdiri dari orang Cina yang mengelak dari timbulnya konflik karena pemerintah dikuasai oleh orang Melayu. Sejalan dengan tulisan Liddle, (dalam Francois Raillon, 1995) tentang “*Kelas Menengah dan Demokrasi Dari Bawah*”, disebutkan bahwa peristiwa Manila (1986) dan Bangkok (1992) menunjukkan bahwa demokratisasi terjadi apabila golongan menengah sanggup menjalin aliansi (bersatu) dengan golongan buruh dalam menghadapi golongan bisnis yang bangkrut. Oleh karena itu, demokratisasi tidak perlu diharapkan dari golongan luar negeri. Demokratisasi yang asli hanya dapat tumbuh dari dalam dan dari bawah.

Dalam tulisan Arif Budiman (1996) tentang “*Demokratisasi dan Keadaan Kelas Menengah di Indonesia*”, beliau menyebutkan bahwa keadaan yang melemahkan kelas menengah di Indonesia adalah karena peranan keluarga pejabat pemerintah masih besar. Oleh karena itu, peranan golongan bisnis Cina dan pribumi sebagai kekuatan pendorong demokratisasi masih sangat kecil, sebab mereka masih memerlukan kerjasama dari pihak negeri untuk bisnisnya. Oleh karena itu, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi, namun praktik demokratisasi masih belum optimal. Pendapat Rizal Mallarangeng (1997) tentang “*Kelas Menengah dan Demokratisasi*” agak berbeda dengan Arif Budiman, karena beliau memberi semangat kepada kelompok kelas menengah di Indonesia.

Mengikuti pendapat Mallarangeng, kelompok kelas menengah di Indonesia justru akan menjadi pihak pertama yang mendukung dan mendorong terjadinya perubahan di Indonesia.

Dalam tulisan Ariel Heryanto (1996) tentang “*Oposisi Kelas Menengah Indonesia Dekade 1990-an*”, diuraikan sejumlah kasus penyimpangan praktik demokratisasi sejak era Orde Baru yang dimulai pada tahun 1965. Di dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Golongan Karya (Golkar) yang merupakan partai pemerintah, selalu meraih suara mayoritas (70%). Semua anggota parlemen, harus memperoleh kelulusan melalui, “penelitian khusus (*Litsus*)” yang sengaja dilakukan oleh pihak berkuasa sehingga keadaan ini tidak mungkin dilalui oleh kalangan oposisi. Para anggota parlemen boleh diberhentikan (*recall*) apabila ia bertentangan dengan rezim yang berkuasa.

Beberapa tulisan yang mengungkap tentang politik, ekonomi dan gaya hidup kelas menengah di Indonesia, berasal dari pemikiran yang berbeda. Kelas menengah politik adalah kelompok tengah masyarakat yang terbangun kebolehan politiknya bukan karena modal atau profesionalisme, melainkan karena intelektualitas atau organisasi. Mereka antara lain berasal dari kalangan intelektual-tenaga akademik-mahasiswa, pengurus organisasi sosial politik, jurnalis dan kalangan politikus. Kelas menengah ekonomi adalah kelompok tengah masyarakat yang berasal dari kalangan pengusaha, profesional, dan investor. Kedua prototipe ini menampilkan gaya hidup tersendiri di kota-kota metropolitan Indonesia.

Tulisan-tulisan tentang kelas menengah itu antara lain termasuklah: Ariel Heryanto tentang “*Bukan Ratu Adil*” (lihat *Forum Keadilan*, April 1996) dan tentang “*Resistensi Politik Kelas Menengah*” (lihat *D&R*, April 1998). Begitu juga tulisan Daniel S. Lev tentang “*Kelas Menengah yang Menyehatkan Negeri*” (lihat *Forum Keadilan*, April 1996), Eep Saefulloh Fatah tentang “*Kinerja Kelas Menengah Kita*” (lihat *Republika*, 20 Juli 1998), Wimar Witoelar tentang “*Tragedi Kelas Menengah*” (lihat *Kompas*, 19 April 1998), Chistanto Wibisono tentang “*Kelas Peribumi Tanpa Diskriminasi*” (lihat *Forum Keadilan*, April 1996), A.E. Priyono tentang “*Konsumtivismes Kelas Menengah Perkotaan*” (lihat *Republika*, 8 Desember 1997), Ongkokham tentang “*Mata Wang dan Golongan Menengah*” (lihat *Kompas*, 8 Januari 1997), dan laporan tentang “*Kelas Menengah Menghadapi Krisis Ekonomi*” (lihat *The Jakarta Post*, 26 April 1998).

Dalam tulisan Ariel Heryanto (1996) tentang “*Bukan Ratu Adil*” dan “*Resistensi Politik Kelas Menengah*” disebutkan bahwa gaya hidup dan konsumerisme dari kelas menengah, merupakan identitas yang tidak dipahami oleh ilmuwan. Mengikuti kedua tulisan itu, di Filipina, para konglomerat yang dikecewakan Marcos ikut memberikan sokongan bagi revolusi “*people power*” yang dipimpin oleh kelas menengah. Manakala di Korea Selatan, gerakan mahasiswa mempunyai kerjasama yang panjang dengan kelas buruh. Di Indonesia, kelas menengah baru bergerak perlahan.

Secara ringkas, Daniel S. Lev (1996) yang menulis tentang “*Kelas yang Menyehatkan Negeri*”, menyebutkan bahwa pemerintah memonopoli politik, dan warga tidak ikut dalam proses politik, dengan sendirinya masyarakat dan pemerintah semakin jelek keadaannya sehingga negeri semakin lemah. Oleh karena itu, kerjasama yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah perlu terus digalakkan, mengingat pemerintah diangkat oleh masyarakat untuk mengurus keperluan administrasi.

Eep Saefulloh Fatah (1998) yang menulis tentang “*Kinerja Kelas Menengah Kita*”, menyebutkan bahwa posisi kelas menengah sebagai kelompok kaum pembaru di Indonesia menjadi kekuatan yang terjepit di tengah-tengah. Ke atas mereka berhadapan dengan elit politik yang berkuasa. Manakala ke bawah, mereka berhadapan dengan masyarakat lapis bawah yang kerangka pemikirannya sudah dibentuk oleh rekayasa ekonomi dan politik Orde Baru di bawah kendali Soeharto sebagai Presiden.

Dalam tulisan Wimar Witalar (1998) tentang “*Tragedi Kelas Menengah*”, beliau menyebutkan bahwa kelas menengah di Indonesia selalu menghadapi praktik korupsi (rasuah), kolusi dan nepotisme (KKN). Padahal sebagai kelompok kelas menengah, mereka suka hidup dalam negeri yang bersih dari KKN.

Pendapat Christanto Wibisono (1996) dalam tulisannya tentang “*Kelas Peribumi Tanpa Diskriminasi*” sangat menarik, sebab beliau mengharapakan kelas menengah di Indonesia hendaknya menjadi cikal bakal pelaku sistem

demokratis di masa depan. Sesama pribumi tidak boleh diskriminatif, siapa saja boleh menjadi Presiden maupun Menteri. Jadi, harus diupayakan adanya persaingan bebas diantara kelas menengah pribumi secara tuntas.

Dalam tulisan A.E Priyono (1997) tentang "*Konsumtivisme Kelas Menengah Perkotaan*", beliau menyebutkan bahwa dibandingkan dengan kelas menengah dimasa lalu yang mempunyai *concern* besar pada masalah keadilan sosial dan demokrasi, *concern* kelas menengah kota kita pada masa kini lebih tertuju pada ambisi-ambisi pribadi.

Mengikuti pendapat Ongkokham (1997) dalam tulisan "*Mata Wang dan Golongan Menengah*", beliau menyebutkan bahwa kelompok kelas menengah di Indonesia lebih siap menghadapi jatuhnya mata uang Rupiah dari golongan menengah di Thailand dan Malaysia. Hanya saja mereka pesimistis, sebab pemulihan ekonomi Indonesia diperkirakan berlangsung lama.

Hasil laporan *The Jakarta Post* (1998) terhadap golongan bisnis menunjukkan bahwa mereka cenderung mengambil langkah-langkah penghematan sebagai upaya untuk mengurangi biaya sehingga mampu mempertahankan bisnis. Sejumlah orang dari kalangan menengah yang diwawancarai juga menunjukkan keengganan mereka untuk menikmati makanan dan minuman di gerai-gerai mewah karena harga yang berlaku sangat tinggi. Itu sebabnya, krisis ekonomi telah membuat orang-orang mengubah gaya hidupnya. Meskipun dalam beberapa kasus, masih ditemui sejumlah orang yang datang ke tempat-tempat hiburan malam, dengan maksud ingin menunjukkan kepada orang lain

bahwa ia masih berada dalam keadaan keuangan yang baik.

Semua sorotan kajian terdahulu baik secara teoretikal maupun empirikal yang dilakukan sebelum dan setelah era reformasi di Indonesia (Mei 1998), telah menimbulkan banyak perubahan bagi kelas menengah kota. Perubahan berarti itu dapat dilihat pada jumlah kelas menengah kota yang cenderung meningkat. Mereka umumnya adalah para profesional yang memiliki pendidikan dan pendapatan tinggi, bersikap mandiri (*independent*), mempunyai kode etik dan gaya hidup tersendiri serta bekerja dalam pelbagai aktivitas yang mengutamakan keahlian (*skill*).

Kajian Terkini Kelas Menengah di Indonesia

Kajian terkini kelas menengah di Indonesia, dilakukan oleh harian Kompas yang melakukan survei tentang kelas menengah Jakarta. Survei *Kompas*, 30 September 1996 tentang kelas menengah Jakarta, terdiri dari beberapa bagian: 1) Antara Stabilitas dan Demokrasi, 2) Gaya Hidup Kelas Menengah Baru Jakarta, 3) Air Cucuran Atap Tidak Selalu ke Pelimbahan, 4) Kelas Menengah Baru: Tidak Sekedar Penampilan.

Proyek kajian tentang kelas menengah dicanangkan oleh beberapa pakar ilmu sosial dari *Institute of Ethnology, Academia Sinica*, Taiwan (1989). Kajian yang disebut proyek SEAMEC (South Asian Middle Classes) dirintis sejak 1989 dan sudah dilakukan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama (1992-1993), dilaksanakan di 4 negeri industri baru di Asia Timur yaitu: Taiwan,

Korea Selatan, Hongkong dan Singapura. Hasil kajian telah didiskusikan pada tahun 1994. Tahap kedua (1995-1996), dilaksanakan dilima negeri Asia Tenggara yaitu: Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Indonesia. Di Indonesia, proyek ini dilakukan oleh harian *Kompas*. Hasil kajian tentang kelas menengah kota di kota metropolitan Jakarta, memberi gambaran tentang keadaan kalangan kelas menengah dilihat dari beberapa sisi yang memiliki impikasi serupa dengan kalangan kelas menengah di kota-kota besar lain di Indonesia.

- **Stabilitas dan Demokrasi**

Konservatif dan ragu terhadap demokrasi merupakan sikap kelas menengah Jakarta. Oleh karena itu, masyarakat dinilai belum siap melaksanakan demokrasi yang sesungguhnya.

- **Partisipasi Politik**

Menurut hasil kajian ini, peran serta politik kelas menengah sangat rendah, karena mereka enggan terhadap perkara yang berbau politik. Dalam gerakan-gerakan sosial yang merupakan salah satu unsur demokrasi, terlihat bahwa peran serta kelas menengah sangat rendah.

- **Gaya Hidup Kelas Menengah Baru Jakarta**

Kelas menengah baru Jakarta memiliki ciri tertentu yaitu berpendidikan tinggi dan juga berpendapatan tinggi. Jumlah sampel kajian ini adalah 1.200 orang, namun yang layak dianalisis adalah 1.073 orang dengan latar belakang pekerjaan berbeda yaitu pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang/pengusaha dan petani. Menurut kajian ini sebagian besar responden (46%) memiliki

pendapatan Rp 400,000 – Rp 1,000,000,- setiap bulan. Sebagian lagi, lebih dari 30 % memiliki pendapatan di atas Rp 1 juta. Dengan peringkat pendapatan seperti ini, gaya hidup kelas menengah baru di Jakarta berbeda dengan kalangan kelas bawah. Mereka cenderung mengonsumsi barang-barang bermerek (*branded*) dan mahal, menggunakan kartu kredit, berbelanja di mall/plaza dan berobat ke luar negeri seperti Singapura, Malaysia dan Amerika Serikat. Kelas menengah baru memiliki rumah, tanah, mobil/sepeda motor dan barang-barang elektronik yang merupakan salah satu dari status kelas menengah kota. Setiap keluarga kelas menengah pada umumnya memiliki 2 rumah dan 2 mobil.

Gaya hidup lain dari kelas menengah kota adalah melancong ke luar negeri. Selain menikmati liburan, melancong ke luar negeri lazim diikuti dengan aktivitas belanja (*shopping*). Olahraga golf adalah olahraga yang diminati oleh kelas menengah kota, bahkan mencerminkan gaya hidup para profesional. Kegemaran bermain golf terlihat dengan semakin banyak sekolah golf di kota. Gaya hidup kelas menengah kota juga tercermin dari perilaku mereka sehari-hari yaitu dalam menggunakan jasa perbankan. Menurut hasil kajian ini, banyak warga kelas menengah kota yang sudah terbiasa menggunakan bank sebagai kemudahan untuk mengurus keuangan mereka.

- **Penampilan Kelas Menengah Kota**

Penampilan responden kajian ini berbeda satu sama lain, sebab mereka berasal dari pekerjaan yang beragam. Oleh karena itu, penampilan seorang lelaki berdasi mahupun perempuan berbusana apik, dengan menjinjing tas

kerja, memakai mobil pribadi, dan membawa *hand-set/hand-phone*, tidak seluruhnya ditemui. Penyebabnya adalah karena mereka berasal dari latar belakang pekerjaan yang berbeda.

Kajian Kelas Menengah di Negeri Jiran

Kajian tentang kelas menengah kota juga menarik perhatian para peneliti. Di Malaysia, diantaranya dilakukan oleh Abdul Rahman Embung (1997). Mengutip pendapat Abdul Rahman Embung, Mohamad Salleh Lamry (1998), menyatakan bahwa kelas menengah Malaysia terutamanya terdiri dari pegawai kerajaan dan guru sekolah. Pada hari ini kelas menengah Melayu juga terdiri dari pegawai-pegawai profesional dan teknikal serta pentadbiran dan pengurusan disektor swasta, dan pekerja kolar putih (*white collar*) yang besar jumlahnya. Manakala dalam pandangan Nordin Selat (1976), kelas menengah Melayu ialah golongan pentadbir Melayu, guru sekolah rendah Melayu, wartawan, tentera dan polis. Akhirnya Mohamed Salleh Lamry (1998), mengutip pendapat Saravananmuthu (1989) menyebutkan bahwa kelas menengah Malaysia terdiri dari: (1) ikhtisas, teknik dan yang berkaitan, (2) pentadbiran dan pengurusan, (3) perkeranian dan yang berkaitan, (4) pekerja jualan dan (5) separuh dari pekerja perkhidmatan.

Manakala kajian tentang gaya hidup kelas menengah kota, juga dilakukan oleh mahasiswa Universiti Malaya dan ditulis dalam bentuk tesis, diantaranya berada di bawah penyeliaan Prof. Dato' Dr. Mohd. Razali Agus. Kajian mahasiswa tingkat sarjana muda Universiti Malaya

(lihat Pang Pei Mien) yang berada di bawah penyeliaan Mohd. Razali Agus (2000), menguraikan gaya hidup kelas menengah kota cenderung dikaitkan dengan perubahan sejumlah kemudahan di kota seperti penyediaan rumah, penyediaan pelbagai fasilitas awam dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh keluarga kelas menengah kota serta upaya-upaya perbaikan kawasan kumuh (*setinggalan*) guna mempercantik penampilan sebuah kota.

Temuan-Temuan Kajian Kelas Menengah

Kajian yang lebih khas dilakukan oleh Aldwin Surya (2005) tentang pembentukan kelas menengah kota terhadap para dosen perguruan tinggi swasta yang berstatus pegawai negeri sipil di Kotamadya Medan. Populasi dosen PTS itu adalah 1.255 orang, dan dengan menggunakan *proportional stratified random sampling*, diperoleh sampel sebanyak 423 orang yang terdiri dari 315 responden laki-laki dan 108 responden perempuan. Dasar penetapan dosen sebagai bagian dari kelas menengah kota adalah karena dosen memenuhi persyaratan defenisi kelas menengah yaitu para profesional yang memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi, pendapatan memadai, gengsi/prestij profesi dan pekerjaan yang terikat dengan etika tertentu. Hasil kajian ini menunjukkan rata-rata pendapatan dosen PTS yang berstatus pegawai negeri sipil adalah Rp 3.500.000,-. Sumber pendapatan sebesar itu diperoleh dari gaji bersih PNS ditambah dengan gaji dari PTS tempat bertugas. Perolehan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 3.500.000,- ini lebih tinggi dari rata-

rata pendapatan kelas menengah kota yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Kotamadya Medan sebesar Rp. 2.500.000,-.

Hasil kajian dimaksud menghasilkan beberapa dapatan (temuan) tentang pembentukan kelas menengah terdiri dari:

1. Dapatan-dapatan tentang faktor-faktor pendorong pembentukan kelas menengah.
2. Dapatan-dapatan tentang faktor-faktor penunjang pembentukan kelas menengah.
3. Dapatan-dapatan tentang faktor-faktor pendorong perubahan gaya hidup kelas menengah.
4. Dapatan-dapatan tentang faktor-faktor yang menguntungkan dari kelas menengah.
5. Dapatan-dapatan tentang faktor-faktor yang menghambat pembentukan kelas menengah.

1.1. Dapatan-dapatan tentang faktor-faktor pendorong pembentukan kelas menengah:

Mengikuti hasil kajian ini, pembentukan kelas menengah ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah :

1. Keadaan ekonomi negeri. Kemajuan berarti dari bidang ekonomi, utamanya dari peningkatan *Gross National Product (GNP)* yang juga menentukan peningkatan pendapatan per kapita, memberi pengaruh signifikan bagi penambahan jumlah kelas menengah. Semakin tinggi pendapatan per kapita penduduk, semakin banyak jumlah kelas menengah. Keadaan ekonomi yang baik, memberi pengaruh kepada

kemajuan industri. Ini berarti industri memerlukan banyak pekerja ahli yaitu kalangan profesional yang terdiri dari pekerja terdidik lulusan perguruan tinggi.

2. Kemajuan dibidang pendidikan, juga memberi pengaruh berarti, khas kepada kemajuan jumlah penduduk yang memperoleh kesempatan belajar di Perguruan Tinggi. Di Indonesia, hingga tahun 2005, dianggarkan jumlah mahasiswa Perguruan Tinggi adalah 4.050.000 orang (15%) dari 27 juta orang penduduk usia 19-24 tahun. Manakala hingga tahun 2020, jumlah mahasiswa perguruan tinggi adalah 6,200,000 orang (25%) dari 24.800.000 orang penduduk usia 19-24 tahun.
3. Kemajuan teknologi modern, secara langsung memberi pengaruh kepada keperluan pekerja dengan keahlian dibidang masing-masing. Perkembangan teknologi juga semakin memudahkan berbagai pekerjaan diselesaikan dengan kualitas tinggi. Oleh karena itu, kemajuan teknologi bagi sebuah negeri sebagaimana terjadi di Indonesia memberi pengaruh terhadap peningkatan kalangan kelas menengah. Peran kelas menengah yang umumnya terdiri dari kalangan profesional semakin berarti bagi pembangunan disegala bidang. Sebab karya para profesional itulah yang banyak diperlukan.
4. Faktor sosiobudaya (*socio-cultural*), memberi pengaruh berarti bagi peningkatan jumlah kelas menengah, utamanya karena masyarakat semakin terbuka

menerima perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan ekonomi, teknologi dan ilmu pengetahuan. Semua ini memicu semakin banyak masyarakat pedesaan mencoba peruntungannya untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik di kota.

5. Faktor politik dan undang-undang (*political-legal*), memberi pengaruh berarti kepada peningkatan jumlah kelas menengah, utamanya dengan adanya kebijakan pemerintah kota setempat/*political-will* untuk memberi ruang gerak kehidupan yang kondusif bagi kalangan profesional berkarier dibidang masing-masing. Selain kebijakan pemerintah kota, faktor kepastian hukum juga memberi pengaruh berarti bagi mendorong semua sendi kehidupan masyarakat melalui para profesional.
6. Faktor perdagangan internasional (*international trade*), juga memberi pengaruh berarti bagi pembentukan dan peningkatan jumlah kelas menengah. Wujud dari perdagangan internasional itu adalah terjadinya kerja sama bilateral sektor perniagaan, sehingga memungkinkan peningkatan produk ekspor ke negeri jiran lain. Sebaliknya produk impor dari negeri jiran banyak masuk ke kota-kota di Indonesia. Iklim berniaga yang kondusif seperti ini, semakin menggiatkan sektor perniagaan dengan semakin banyak investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Ini berarti mendorong semakin banyak perusahaan milik pemerintah dan swasta yang memerlukan pekerja

terlatih dan terdidik dibidang masing-masing.

1.2. Dapatan-dapatan tentang faktor-faktor penunjang pembentukan kelas menengah.

Berkenaan dengan faktor pendorong, terdapat juga faktor penunjang pembentukan kelas menengah. Beberapa di antara faktor penunjang itu adalah:

1. Semakin banyak perempuan yang bekerja, sehingga banyak pasangan suami-istri yang didapati memiliki peningkatan pendapatan. Keadaan ini menjadi pemicu peningkatan jumlah kelas menengah, sebab pasangan suami-istri yang bekerja memiliki kemampuan untuk hidup berdampingan dengan kalangan kelas menengah lainnya.
2. Bertambahnya keragaman pekerjaan yang memerlukan pekerja terlatih dan terdidik di berbagai-bagai sektor pekerjaan dengan gaji tinggi, memberi pengaruh signifikan bagi pembentukan kelas menengah. Di sektor keuangan saja, banyak profesional yang harus memiliki sertifikasi profesi standar internasional, antara lain *Chartered Financial Analyst, Cartified Financial Planner, Cartified Internal Auditor, Financial Risk Manager, Chartered Financial Consultant dan Senior Cartified Valuer*. Semua profesi ini memiliki kode etik masing-masing, sehingga sertifikasi profesi dapat dicabut apabila terbukti melanggar kode etik.

1.3. Dapatan-dapatan tentang faktor-faktor pendorong perubahan gaya hidup kelas menengah.

Mengikuti hasil kajian ini, perubahan gaya hidup kelas menengah ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya :

1. Perubahan dalam pendapatan, sebagai akibat peningkatan pendapatan suami maupun pendapatan pasangan suami-istri yang bekerja. Dengan peningkatan pendapatan banyak keluarga kelas menengah memiliki kemampuan keuangan untuk membeli barang/jasa berkualitas tinggi. Mereka juga cenderung membeli barang yang sudah terkenal (*brand oriented*), memanfaatkan waktu luang dengan berbagai-aktivitas yang memerlukan biaya tinggi. Sebagai contoh: liburan ke luar negeri, mengadakan pesta, membeli makanan/minuman siap saji dan belajar di sekolah yang memiliki prestij, reputasi dan kualitas tinggi, serta membeli rumah di kawasan kompleks perumahan terkenal. Kajian ini mendukung proyek SEAMC (*Southeast Asian Middle Classes*) pada tahun 1996 tentang kelas menengah di Jakarta. Proyek SEAMC di Indonesia dilaksanakan oleh harian *Kompas*. Hasil kajian itu menunjukkan bahwa kelas menengah di kotaraya Jakarta gemar membeli barang-barang merek (*brand*) terkenal dan berkualitas tinggi.
2. Tersedianya fasilitas di kota seperti *mal*, pusat perbelanjaan (*hyper market*), restoran, gerai, hotel, pusat kebugaran, *hospital*, universitas, rumah mode (butik) dan perawatan kecantikan; secara langsung memberi pengaruh berarti bagi perubahan gaya hidup. Banyak keluarga menyukai makan di restoran cepat saji maupun di kedai makan yang ada di kota. Pusat kebugaran, rumah sakit (*hospital*) dan universitas terbaik, menjadi pilihan keluarga kelas menengah dan merupakan bagian dari gaya hidup sehari-hari. Rumah mode dan pusat perawatan kecantikan juga menjadi bagian dari gaya hidup modern terutama untuk tetap menjaga penampilan mereka sehari-hari.
3. Jaminan keamanan bagi penduduk, memberi pengaruh berarti bagi kalangan kelas menengah untuk memanfaatkan waktu luang untuk berbagai aktivitas hingga larut malam tanpa khawatir terhadap kemungkinan terjadinya tindak kriminal. Jaminan keamanan, misalnya di kota Medan, didukung oleh kebijakan Walikota setempat dengan membuat kota "*terang benderang*" di malam hari, sehingga kota seakan hidup selama 24 jam setiap hari.
4. Peningkatan konsumerisme dari kelas menengah terhadap banyak barang buatan lokal dan luar negeri, memberi pengaruh berarti bagi kalangan menengah kota. Di kota-kota besar Indonesia, banyak ditemukan barang-barang impor buatan negeri Taiwan, Hongkong, Korea Selatan, Jepang dan China dengan biaya yang lebih rendah dari buatan lokal. Keadaan ini memicu peningkatan konsumerisme dari kalangan kelas menengah.

1.4. Dapatan-dapatan tentang faktor-faktor yang menguntungkan dari kelas menengah.

Peningkatan jumlah kelas menengah di Indonesia, memberi keuntungan berarti bagi berbagai pihak, utamanya kepada pemerintah kota. Beberapa keuntungan itu antara lain :

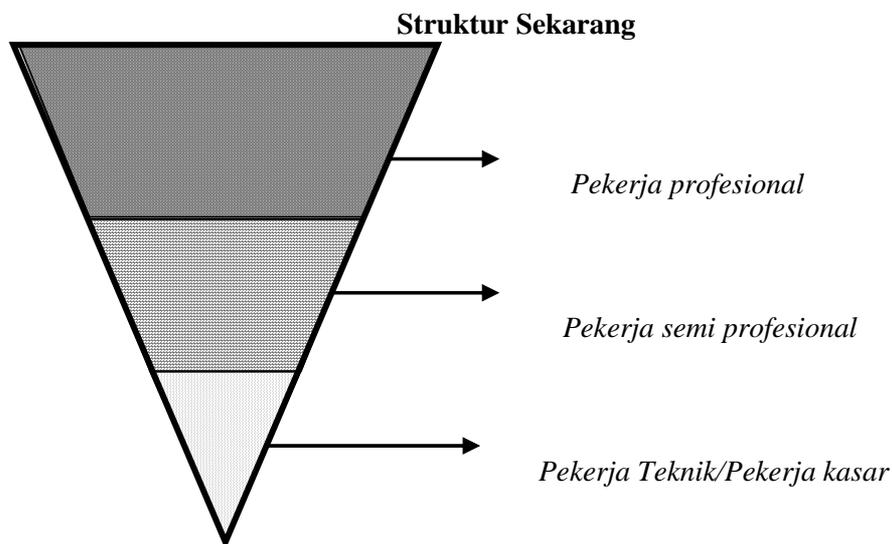
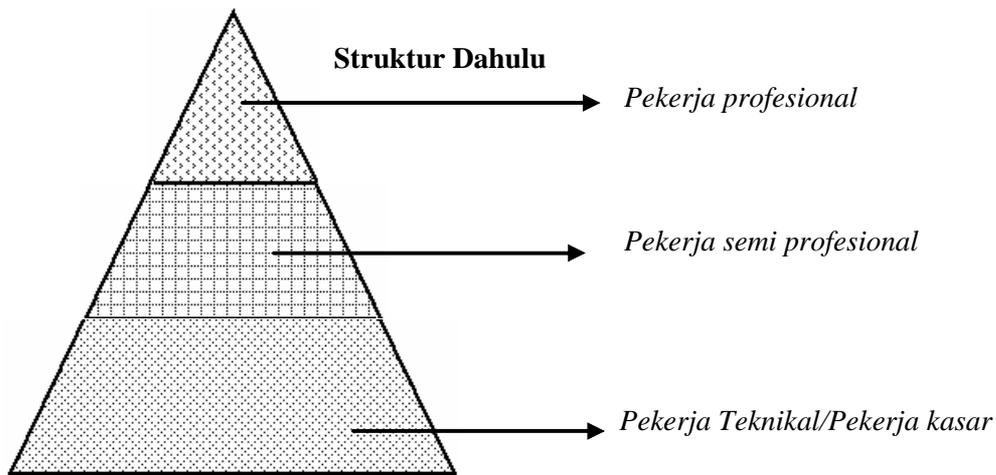
1. Peningkatan jumlah kelas menengah secara langsung menjadi kekuatan bagi pihak pemerintah kota setempat untuk memicu (mendorong) percepatan pembangunan di berbagai sektor. Semakin banyak kalangan kelas menengah yang merupakan para profesional di bidang masing-masing, semakin cepat gerak laju pembangunan. Beragam jenis pekerjaan dikelola oleh para profesional. Ekoran dari keadaan ini adalah peningkatan kepercayaan dari investor asing untuk menanamkan modal ke Indonesia karena jumlah pekerja terampil banyak ditemukan.
2. Peningkatan jumlah kelas menengah di kota-kota besar Indonesia, memberi pengaruh berarti kepada pemerintah kota setempat, utamanya karena pemerintah kota setempat pembayaran pajak sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Wujud pembayaran pajak itu antara lain berasal dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak orang asing, retribusi dari parkir mobil, kawasan wisata dan pajak pendapatan.
3. Peningkatan jumlah kelas menengah di Indonesia, memberi pengaruh berarti kepada pemerintah kota, utamanya karena kawasan pinggiran kota (*suburban*) yang banyak

diminati oleh kalangan kelas menengah sebagai kawasan kediaman mereka, berkembang pesat. Sebelumnya kawasan seperti ini merupakan lahan kosong dan sepi. Namun dengan dasar kerjasama antara pemerintah kota dengan pemaju (pengembang), berbagai kompleks perumahan dibangun dengan fasilitas lengkap.

4. Peningkatan jumlah kelas menengah berarti juga semakin memperkuat komposisi pekerja ahli yang dimiliki oleh sebuah kota. Ini berarti komposisi pekerja seperti piramida terbalik. Jumlah pekerja profesional lebih banyak dari pekerja semi profesional dan pekerja teknik (pekerja kasar). Pekerja profesional adalah pekerja yang memiliki pendidikan, keahlian, keterampilan tinggi dan pengalaman memadai. Mereka umumnya lulusan perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri. Sebagai profesional, mereka menjadi pendukung berbagai kebijakan pemerintah kota dan menjadi kelompok ahli yang mampu mengerjakan berbagai proyek yang menggunakan teknologi tinggi. Peningkatan jumlah profesional di berbagai bidang, juga memberi efek positif sebab dapat mengurangi ketergantungan kepada profesional asing. Ini berarti, pihak pemerintah kota dapat mempercayai para profesional lokal untuk mengerjakan kerja-kerja proyek yang memerlukan tenaga ahli dan teknologi tinggi. Perubahan struktur dahulu dan struktur sekarang antara para pekerja profesional, semi profesional

dan pekerja teknik (kasar), disajikan berikut ini:

1.5. Dapatan-dapatan Tentang Faktor-Faktor Penghambat Pembentukan Kelas Menengah.
Mengikuti dapatan-dapatan kajian ini, pembentukan kelas menengah



memiliki beberapa faktor penghambat. Beberapa diantaranya terjadi karena :

1. Adanya sikap dan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa kelas menengah adalah berbeda dengan kelas lainnya. Secara implisit, kelas menengah didefinisikan pada dirinya sendiri yaitu anggota masyarakat yang memiliki profesi, gaji, gaya hidup dan tingkat pendidikan yang memadai. Kelas menengah juga diidentikkan sebagai kaum pemilik perusahaan (*borjuasi*) yang menempati posisi pertama dalam kelompok kelas menengah. Serupa dengan golongan *borjuasi itu* adalah mereka yang memiliki selera hidup dan gaji sebanding dengan pemilik perusahaan seperti pengacara, dokter, akuntan, dosen, arsitek, perwira polisi dan militer serta manajer.
2. Kekaburan pengertian kelas menengah di Indonesia yang tidak berakar dalam sejarah politik dan sejarah masyarakat Indonesia, sehingga memberi pengaruh di berarti di Indonesia. Keberadaan kelas menengah di Indonesia muncul pada pemerintahan Orde Baru yang tercermin dari pola konsumsi dan gaya hidup. Perubahan gaya hidup itu nampak pada kebiasaan seperti berbelanja di pasar swalayan, kebiasaan makan makanan cepat saji, pemanfaatan waktu luang di *café/pub*, bermain golf, membeli dan memakai mobil terkini sebagai mobil pribadi, dan mempercayakan pengasuhan kanak-kanak kepada *baby sitter*.

Selain itu, praktik *korupsi (rasuah), kolusi dan nepotisme (KKN)* yang semakin meluas di sektor pemerintahan dan swasta, sehingga bertentangan dengan prinsip dari para profesional yang mengutamakan keahlian, prestasi dan kode etik dalam bekerja. Padahal untuk menjadi sebuah negeri maju, derajat keprofesionalan menjadi penting dan sangat dihargai. Keadaan seperti ini memang membuat kalangan profesional menjadi frustrasi, sehingga ada kecenderungan memilih bekerja dan menetap di negeri-negeri maju yang lebih menghargai profesi dan derajat keprofesionalan.

3. Adanya isu etnik yang menganggap etnik Tionghoa menguasai perniagaan di Indonesia, sehingga mendorong munculnya perbedaan (*dikotomi*) persepsi antara kelas menengah pribumi dengan kelas menengah Tionghoa. Sejarah aksi ganyang keturunan China/Tionghoa, merupakan bukti adanya dikotomi itu. Dikotomi seperti ini pernah mencapai puncaknya pada bulan Mei 1998 sewaktu terjadi demonstrasi yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan sasaran menjarah, menghancurkan semua gerai milik etnik Tionghoa. Malah aksi ganyang keturunan China/Tionghoa itu mengarah kepada penganiayaan fisik dan pemerkosaan.

Implikasi Keberadaan Kelas Menengah

Keberadaan kelas menengah kota disebut negeri secara langsung

memberi pengaruh berarti untuk percepatan pembangunan. Aktivitas dan karya mereka mengikut bidang tugas masing-masing, ikut mendorong pertumbuhan dan kemajuan disegala bidang. Oleh karena itu, implikasi keberadaan kelas menengah disebuah kota dapat dicermati dari pelbagai sisi.

1. Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, menunjukkan bahwa pendapatan kelas menengah kota relatif lebih memadai dibanding kelas menengah. Melalui pemilikan keterampilan dan pendidikan tinggi, kelas menengah bekerja dan memperoleh pendapatan mengikut keahliannya. Di Indonesia pendapatan kelas menengah kota relatif berbeda diantara kota-kota metropolitan dan kota-kota besar lainnya. Sebagai contoh, data pendapatan kelas menengah yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Pemerintah Kota Medan tahun 2002 berkisar antara Rp 2,500,000– Rp 3,000,000. Manakala rata-rata pendapatan dosen PTS berstatus PNS di Kota Medan adalah Rp 3.500.000,- (Aldwin Surya, 2005).

Implikasi dari jumlah purata pendapatan kelas menengah di kota metropolitan Medan adalah bahwa pendapatan responden masih kecil apabila dibandingkan dengan kelas menengah negeri lain. Di Malaysia, kelas menengah memiliki pendapatan mulai dari Rp 8.697.500, atau setara dengan RM 3,479 untuk kurs RM 1 = Rp 2,500,-.

2. Konsumerisme

Dari sisi konsumerisme, kalangan kelas menengah di Indonesia adalah pelanggan yang senang berbelanja barang-barang berkualitas tinggi dengan merek terkenal. Pola konsumtif seperti ini juga memiliki kesamaan dengan pola belanja orang kaya Indonesia yang cenderung konsumtif. Implikasi dari pola konsumerisme bagi kalangan kelas menengah adalah semakin banyak produsen dalam dan luar negeri yang menawarkan barang-barang berkualitas tinggi kepada mereka. Ini berarti, kalangan kelas menengah akan puas hati dan meningkat marwah dirinya apabila dapat berbelanja barang-barang berkualitas tinggi. Kecenderungan mengeluarkan uang tambahan guna mendapatkan barang berkualitas tidak hanya di kota-kota besar Indonesia saja, tetapi juga dihubungkan dengan aktivitas melancong ke negeri lain sembari berbelanja. Beberapa negeri di Asia Tenggara yang menjadi tujuan wisata belanja adalah Malaysia, Thailand dan Singapura.

Akibat dari banyak produsen dalam dan luar negeri yang menawarkan produk masing-masing adalah terjadinya persaingan di antara keduanya. Hal ini sebenarnya menguntungkan bagi konsumen kelas menengah, sebab mereka akan memperoleh barang-barang yang berkualitas tetapi dengan harga relatif rendah.

3. Pendidikan

Kalangan kelas menengah di Indonesia umumnya Medan memiliki pendidikan memadai yaitu lulusan perguruan tinggi S1 dan sebagian lagi merupakan lulusan pasca sarjana (S2 dan S3) dari universiti dalam dan luar negeri. Mereka adalah kalangan profesional yang menjalani profesi berbeda dengan memperoleh gaji tinggi.

Implikasi dari pendidikan yang dimiliki responden menunjukkan bahwa kota-kota metropolitan dan kota-kota besar lain di Indonesia memerlukan banyak kalangan kelas menengah lulusan perguruan tinggi guna mengisi berbagai sektor pekerjaan yang menggunakan teknologi canggih. Beberapa sektor pekerjaan seperti bidang keuangan, malah memerlukan profesional yang memiliki sertifikasi standar internasional. Selain itu, banyak perusahaan milik swasta dan pemerintah saat ini membuat ketentuan agar para staf mereka terus meningkatkan pendidikannya, sehingga memiliki ijazah S1 dan S2 Bahkan jika mungkin memiliki ijazah S3 (Ph.D).

Bagi pengelola pendidikan tinggi, hal ini memberi peluang baru agar lulusan dari universiti mereka semakin banyak diperlukan oleh perusahaan lokal dan asing. Hal ini menimbulkan akibat agar universitas secara berterusan menata ulang kurikulum, kemampuan dosen, pelbagai kemudahan yang dimiliki, dan kerja sama dengan sesama perusahaan lokal dan asing. Sebab bagaimanapun perusahaan lokal dan

asing inilah yang banyak memerlukan pekerja profesional lulusan universitas.

4. Keluarga

Kalangan kelas menengah di Indonesia umumnya memiliki keluarga kecil yaitu keluarga inti yang terdiri dari ibu, bapa dan 2 orang anak. Namun demikian, beberapa keluarga kelas menengah memiliki 3 orang anak. Wujud keluarga kecil ini merupakan salah satu keberhasilan Keluarga Berencana yang merupakan program Nasional. Kampanye Keluarga Berencana yang dilaksanakan sejak masa pemerintahan Orde Baru, berisi himbuan agar pasangan suami istri hanya memiliki 2 orang anak saja.

Kampanye ini ditindak-lanjuti oleh pihak pemerintah yang hanya membayar tunjangan bagi seorang istri dan 2 orang anak saja untuk setiap pegawai negeri. Implikasi dari kampanye ini ternyata memberi pengaruh berarti karena pemerintah boleh menghemat uang untuk iuran tunjangan anak dan istri. Kampanye ini juga diikuti oleh perusahaan swasta, sehingga secara nasional kampanye ini dinilai berhasil menekan pertumbuhan penduduk. Wujud dari keluarga kecil memungkinkan ibubapa memberi perhatian lebih bagi kesehatan dan pendidikan putra-putri mereka. Oleh karena itu, banyak perusahaan asuransi (*insurance*) “membidik” keluarga kecil ini dalam menjual produk-produk asuransi jiwa, kesehatan dan pendidikan.

Implikasi dari keluarga kelas menengah yang hanya memiliki 2 atau 3 orang anak saja, direspon oleh produsen mobil. Banyak produsen mobil membuat mobil ukuran kecil yaitu hanya untuk 4 orang saja. Implikasi lain diikuti oleh para pemaju/pengembang dengan membuat rumah ukuran kecil (2 atau 3 kamar tidur) yang juga berhalaman kecil, sehingga banyak kalangan kelas menengah yang mampu membeli rumah.

5. Domisili/rumah kediaman

Kalangan kelas menengah di kotaraya Medan, cenderung memilih domisili/rumah kediaman di pinggiran kota yaitu kompleks perumahan yang memiliki ukuran dan halaman kecil, tetapi memiliki fasilitas lengkap. Jarak antara rumah kediaman kelas menengah dengan pejabat adalah 10-15 km².

Implikasi dari rumah kelas menengah utamanya berguna bagi para pemaju (pengembang) dalam menciptakan desain rumah di kawasan yang asri dan selesa. Oleh karena itu, implikasi lain dari pembinaan sektor perumahan bukanlah kepada desain yang terkini saja, tetapi juga memperhatikan beberapa aspek seperti daya tahan rumah melalui penggunaan material yang kokoh, dan bebas dari banjir dan tahan gempa.

Implikasi dari rumah kediaman adalah tindakan pemerintah membina satu juta rumah selama tahun 2004. Kampanye ini berlaku bagi rumah sederhana sehat (RSS) dan juga rumah menengah dan

diberikan kepada penduduk yang memang belum memiliki rumah. Oleh karena kemampuan pemerintah terbatas, maka dijalinlah hubungan kerjasama saling menguntungkan dengan perusahaan swasta. Ini bermakna, sektor properti di seluruh provinsi Indonesia semakin berkembang sejalan dengan keperluan banyak rumah untuk rakyat Indonesia.

6. Sosial-budaya

Kalangan kelas menengah di Indonesia merupakan satu kelompok heterogen yang berasal dari etnik berbeda. Namun berbeda etnik bukanlah masalah berarti untuk menjalin kerja sama guna mencapai kinerja optimal. Beberapa etnik/suku seperti Melayu, Batak, Minang, Jawa, Sunda, Cina/Tionghoa, Aceh, Gayo, dan Palembang menjalani hidup rukun dan bekerja harmonis meskipun masing-masing memiliki adat-istiadat tersendiri.

Implikasi dari keadaan sosialbudaya yang beragam utamanya diperlukan bagi para manajer yang memiliki staf berbeda etnik. Perbedaan sosiobudaya bukanlah masalah pelik untuk menjalin kerja sama di dalam berbagai aktivitas, termasuk pada aktivitas keagamaan. Implikasi ini juga untuk mengurangi terjadinya konflik etnik yang sangat merugikan mana-mana pihak yang bertikai.

7. Politik

Kalangan kelas menengah di Indonesia, memiliki aspirasi politik

masing-masing. Oleh karena itu, mereka cenderung tidak terlibat aktif di panggung politik, karena itu seakan bertentangan dengan derajat keprofesionalan yang berorientasi kepada sikap independen, bekerja efisien, memiliki target hidup yang jelas, dan bersikap lojik dalam berpikir.

Implikasi dari aspek politik adalah kelas menengah di Indonesia lebih rasional, selektif dan impersonal (tidak memihak) kepada mana-mana partai politik yang terdapat di Indonesia. Pada Pemilihan Umum 5 Februari 2004, terdapat 24 partai politik yang ikut dalam Pemilu dan akan berkurang menjadi 6 partai saja pada Pemilu 2009.

8. Profesi

Kelas menengah di Indonesia adalah kelompok orang yang setia menjalani profesi sesuai bidang keahliannya.

Implikasi dari profesi bagi kelas menengah adalah kesetiaan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kesetiaan kepada profesi juga ditunjukkan melalui ketaatan kepada kode etik, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pekerjaan sangat kecil. Namun demikian, kesetiaan para profesional yang berasal dari kalangan kelas menengah kepada kode etik, bertentangan dengan praktik rasuah (korupsi), kolusi dan nepotisme (KKN) yang lazim dijumpai di Indonesia. Keadaan ini dapat melemahkan semangat kerja para profesional yang terbiasa bekerja dengan iklim kerja yang efisien,

efektif, terukur dan memiliki target yang jelas.

9. Karier

Bagi kalangan kelas menengah, perjalanan karier adalah proses yang memerlukan upaya tinggi. Sebagai profesional, meminta bantuan orang lain agar dapat mendapatkan promosi pekerjaan ke peringkat lebih tinggi, tidaklah lazim. Oleh karena itu, konsep karier dalam persepsi kelas menengah adalah kerja keras agar memiliki kemampuan dan hasil kerja tinggi. Penghargaan terhadap upaya itu adalah hal yang diharapkan dan menimbulkan rasa puas hati terhadap pekerjaannya.

Implikasi dari karier bagi kelas menengah di Indonesia adalah bekerja keras, sungguh-sungguh menjalani amanah, dan mengelak dari aktivitas yang mengarah kepada *korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)*. Sukses dalam karier bagi kelas menengah adalah buah dari kesungguhan mencapai kinerja optimal.

10. Kinerja

Dalam persepsi kalangan kelas menengah di Indonesia, kinerja identik dengan upaya serius mencapai sesuatu. Dalam kapasitas sebagai profesional, maka kinerja memerlukan sikap *impersonal* (tidak memihak), derajat keprofesionalan, target yang jelas, efisien, terikat dengan kode etik dan optimis. Semua indikator yang menentukan pencapaian kinerja optimal ini, demikian melekat bagi

kalangan kelas menengah sehingga mereka saling menghormati profesi masing-masing.

Implikasi dari kinerja bagi kelas menengah adalah sikap independen yang berakar pada kemampuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Kesimpulan

Di era globalisasi saat ini, peran kelas menengah kota terhadap percepatan pembangunan semakin diperlukan. Kelas menengah tidak hanya berperan sebagai penyeimbang bagi dua kelas sosial lainnya yaitu kelas atas dan kelas bawah, tetapi juga menjadi motivator bagi pihak lain. Peran sebagai motivator itu antara lain tercermin dari perilaku profesional yang mereka tunjukkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kalangan kelas menengah adalah bagiana dari masyarakat Indonesia yang mencapai kesuksesan karier dan peningkatan kesejahteraan melalui kerja keras, disiplin, penuh semangat, tidak cepat putus asa dan terikat dengan kode etik dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Tidak heran jika kalangan kelas menengah yang umumnya adalah para profesional, selalu menjadi contoh bagi warga lainnya.

Bagi Indonesia, keberadaan kelas menengah kota memberi pengaruh berarti dalam banyak aspek seperti ekonomi, konsumerisme, pendidikan, keluarga, domisili/rumah kediaman, sosial-budaya, politik, profesi, karier dan kinerja. Keberadaan kelas menengah kota semakin lengkap karena mereka berasal dari banyak latar belakang pendidikan dan profesi seperti dokter, arsitek,

pengacara, dosen dan guru, perwira polisi dan perwira militer, abdi negeri (Pegawai Negeri Sipil), bankir, manajer perusahaan swasta dan BUMN, pengusaha, artis/aktor, dan profesi lain yang memiliki pendidikan dan keterampilan tinggi, pendapatan rata-rata Rp 3.500.000,- dan pekerjaan mapan. Dengan kriteria ini mereka mampu menikmati hidup dan kesejahteraan layak.

Daftar Kepustakaan

- Abdul Rahman Embung, (1996). **“Cultural Trasformation of Malay Middle Class in Malaysia”**. Kertas kerja International Workshop on The Southeast Asian Middle Classes in Comparative Perspective. Taipei, Taiwan.
- Aldwin Surya. (2002). **Bisnis. Konsep dan Fungsi**. Cetakan Pertama. Medan: Universitas Sumatera Utara Press
- _____. (2005). **Pembentukan Kelas Menengah Bandar. Kajian Kes Gaya Hidup Pegawai Negeri di Kota Medan, Indonesia**. Tesis S3. Universiti Malaya. Kuala Lumpur, Malaysia.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan (2001). **Medan Dalam Angka 2001**. Medan: Pemerintah Kota Medan.
- Bonavia, David. (1990). **Cina dan Masyarakatnya**. Alih bahasa Dede Oetomo. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Calhoun, Craig, Donald Light dan Suzanne Keller (1997). **Sociology**. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Cochran William G.(1984). **Sampling Techniques**. New Delhi: Eastern Private Limited.
- Christianto. Wibisono, (1998). **Menelusuri Akar Krisis Indonesia**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

-
- Eko. Budihardjo dan Sudanti Hardjohubojo (1993). **Kota Berwawasan Lingkungan**. Bandung: Penerbit Alumi
- Engel, James F., Roger D. Blackwell dan Paul W. Miniard, **Perilaku Konsumen** Jilid 1. Alih bahasa Drs. F.X Budiyanto. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Giddens, Anthony. (2000). **Sociology**. Third Edition. Cambridge: Polity Press.
- Henslin, James. M. (2001). **Sociology. A Down-to-Earth Approach**. Fifth Edition. Massachusetts: Allyn and Bacon Company.
- Hadi Jaya (editor), (1999). **Kelas Menengah Bukan Ratu Adil**. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yoga.
- Hisyam, (2003). **Krisis Masa Kini dan Orde Baru**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Iwa Husen Iskandar, dan H. Kusnada., (2001) **Sosiologi**. Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Jaacob Harun, (1991). **Keluarga Melayu Bandar. Satu Analisis Perubahan**. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia.
- Kotler, Philip, Swee Hoon Ang, Siew Meng Leong dan Chin Tiong Tan. (1996). **Marketing Management. An Asian Perspective**. Singapore: Prentice-Hall Inc.
- Kotler, Philip, Swee Hoon Ang, Siew Meng Leong dan Chin Tiong Tan. (1999). **Manajemen Pemasaran. Perspektif Asia**. Buku 1 Terjemahan Fandy Tjiptono, S.E. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Landis, Judson R., (1992). **Sociology. Concepts and Characteristics**. Eight Edition. California: Wadworth Publishing Company.
- Mohd. Razali Agus (2000). **Mencari Tempat Berteduh, Mengejar Rumah Impian : Pengabaian Kolonial, Keserakahan Spekulator**. Syarahan Perdana. Kuala Lumpur: Bahagian Perhubungan Awam, Universiti Malaya.
- Mohd. Razali Agus (2001). **Perumahan Awam di Malaysia. Dasar dan Amalan**. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd.
- Medan Dalam Angka* 2001. Badan Pusat Statistik Kotamadya Medan.
- N. Daldjoneni, (1985). **Seluk Beluk Masyarakat Kota**. Bandung: Penerbit Alumi.
- Nordin Selat, (1976). **Kelas Menengah Pentadbir Melayu**. Kuala Lumpur: Penerbit Utusan Melayu (M) Bhd.
- Parsudi Suparlan, (1996). **Diktat Antropologi Perkotaan**. Jakarta: Universitas Indonesia. Jurusan Antropologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Rhenald Kasali, (1998). **Membidik Pasar Indonesia. Segmentasi, Targeting dan Positioning**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rohana Yusuf, (2001). **Asas Sains Sosial Dari Perspektif Sosiologi**. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
- Rossides, Daniel W. (1997). **Social Stratification : The Interplay Class, Race, and Gender**. 2d.ed. Upper Saddle River NJ: Prentice-Hall
- Siswono Yudo Husodo, (1985). **Warga Baru. (Kasus Cina di Indonesia)**. Jakarta: Lembaga Penerbitan Yayasan Padamu Negeri.
- Sapari Imam Asya'ri (1993). **Sosiologi Kota dan Desa**. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional
- Schaefer, Richard T.(2002). **Sociology. A Brief Introduction**. Fourth Edition.
-

-
- International Edition. New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Tania Li (1995). **Orang Melayu di Singapura**. Selangor: FORUM
- Tanter, Richard dan Kenneth Young. (1993). **Politik Kelas Menengah Indonesia**. Jakarta: LP3ES.
- Todaro, Michael P., (1998). **Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga**. Edisi Keenam Jilid 1. Alih Bahasa Haris Munandar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Tuckman, Bruce W., (1982). **Conducting Educational Research**. New York: Harcourt Brace Jovannovich Publishers.

Majalah

- WARTA EKONOMI, Nombor 2/XV/19 Januari 2003
- WARTA EKONOMI, Nombor 062/XV/26 Mac 2003
- D & R, April 1998
- GATRA, 4 Januari 1997
- GATRA, 31 Mei 1997
- FORUM KEADILAN, April 1998
- FORUM KEADILAN, April 1996
- FORUM KEADILAN, Agustus 1995

Surat Kabar

- Harian *Kompas*, 5/4/2004
- Harian *Kompas*, 19/10/1998
- Harian *Kompas*, 19/4/1998
- Harian *Kompas*, 8/1/1997
- Harian *Kompas*, 30/9/1995
- Harian *Republika*, 8 Desember 1997
- The Jakarta Post* 26 April 1998
- The Jakarta Post* 23 Juni 1997
- Harian *Analisa*, Khamis: 19/2/2004
- Harian *Medan Bisnis*, Khamis: 8/1/2004